



KASUS BANJIR DI KOTA YOGYAKARTA

Warga Bantaran Kali Code Diminta Waspada

Di Kulon Progo pemerintah gagal mengantisipasi siklus banjir tahunan.

Ali Nur Yasin
ali@tempo.co.id

YOGYAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunda mengeluarkan rekomendasi penetapan status darurat bencana banjir menyusul berkurangnya dampak banjir di perkotaan. "Untuk status darurat sementara kami tunda karena intensitas banjir, khususnya Kali Code, mulai berkurang," ujar Kepala Badan Penanggulangan Kota Yogyakarta, Agus Winarto, kepada *Tempo* di sela-sela evaluasi dan pemetaan dampak banjir, kemarin.

Meski demikian, pihaknya belum merekomendasikan warga di bantaran, terutama dari titik Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kampung Bintaran, hingga Kecamatan Mergangsan, untuk menetap lama di

rumah. Akibat banjir yang terjadi pada 22 April lalu, sekitar 200 lebih keluarga yang tinggal di sepanjang bantaran rawan terkena banjir.

"BMKG mengeluarkan rekomendasi agar warga di bantaran terus waspada sampai awal pekan ini. Sebab, hujan tercatat tinggi dan harus siap mengungsi lagi," kata Agus.

Dari pantauan *Tempo*, titik-titik pengungsian di Code sudah berkurang. Hanya, saat malam, para anak-anak dan warga lanjut usia sudah merapat ke titik-titik terdekat untuk mengantisipasi banjir berulang. Pemerintah kota juga memerintahkan tujuh puskesmas melakukan uji laboratorium untuk memastikan keamanan 200 sumur warga yang terendam banjir.

"Seluruh air sumur di bantaran kali juga sudah disedot keluar dan dikosongkan sementara agar tak dipakai dulu sampai uji laboratorium keluar. Sumur itu sempat tercemar

material banjir," ujar Agus. Air sumur yang tercemar itu baru diperbolehkan dikonsumsi mulai awal pekan ini setelah larutan penjernih dibagikan kepada warga.

Koordinator Operasional Tim Reaksi Cepat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Endro Sambodo, membenarkan jika status untuk menetapkan darurat banjir belum dikeluarkan lantaran fluktuasi aliran di Code cenderung naik-turun. "Pemerintah Yogyakarta dan BPBD akan merekomendasikan status darurat jika terjadi dampak secara kontinu berturut-turut," ujarnya.

Adapun Sekretaris Daerah Pemerintah Kulon Progo, Astungkoro, mengatakan pemerintah daerah tidak mengantisipasi siklus banjir 10 tahunan. "Air hujan melimpah lebih tinggi," ujarnya kemarin. Menurut dia, pemerintah mengacu pada siklus banjir 50-100 tahunan.

Sampai akhir pekan lalu, empat kecamatan di Kulon Progo masih terendam banjir. Empat kecamatan itu meliputi

Temon, Panjatan, Galur, dan Lendah yang merupakan kawasan langganan banjir.

Menurut Astungkoro, sejumlah irigasi dan sungai, seperti Sungai Gun Sheiro di kawasan tersebut, tidak bisa menampung limpahan air hujan. Seharusnya air yang masuk ke sungai dialirkan ke laut selatan. "Tapi laut pasang," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, belum mencabut status darurat bencana di kawasan yang terendam banjir selama dua pekan. Dinas Sosial, kata Astungkoro, sudah menyalurkan bantuan sekitar Rp 10 juta untuk penyediaan logistik bagi korban banjir.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banjir terparah dialami warga Panjatan yang terdiri atas 723 keluarga. Air merendam rumah warga dengan ketinggian 30-100 sentimeter. "Di dalam rumah genangan biasa. Jadi, warga tidak mengungsi," kata Kepala Badan Penanggulangan Kulon Progo, Untung Waluyo, kepada *Tempo*, Ahad kemarin.

• PRIBADI WICAKSONO | PITO AGUSTIN RUDIANA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005